

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Cayus Julius (100 - 44 SM) memiliki beberapa papan tulis putih yang disimpan di lapangan tempat rakyat berkumpul. Papan tulis tersebut disebut dengan *Forum Romanum* yang berisi tentang pengumuman-pengumuman resmi. Dilihat dari isinya, *Forum Romanum* ini dibedakan menjadi 2 macam. *Pertama, Acta Senatus* yang berisi tentang laporan-laporan singkat sidang petinggi pemerintahan dan keputusannya. *Kedua, Acta Diurna Populi Romawi* yang berisi tentang keputusan-keputusan rapat rakyat dan berita-berita yang lainnya. Papan ini juga digunakan kampanye pemerintahan untuk memuat berita mengenai peristiwa yang perlu diketahui oleh rakyat.¹

Fungsi pers merupakan sarana publikasi hasil rapat-rapat penting yang melibatkan pemerintah dan rakyat. Dengan menggunakan media papan di tempat-tempat umum sebagai papan pengumuman hasil rapat tersebut. Isi dari pengumuman tersebut dibedakan berdasarkan muatannya.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad ke-17 di Inggris dan Amerika Serikat dituliskan oleh para pelancong dalam buku yang disimpan di ujung meja bartender. Ini yang menjadi cikal bakal pers modern. Kemudian, pada tahun 1609, surat kabar pertama lahir ketika percetakan-percetakan mengumpulkan berita tentang perkepalan, gosip dan argumen politik. Berawal dari surat kabar tersebut,

¹ Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 5-6.

para politisi memperbincangkan fenomena yang disebut dengan opini publik, kebebasan berbicara dan pers bebas.²

Istilah pers dalam kamus populer diambil dari bahasa Inggris, yakni *press* yang berarti cetakan. Dalam istilah operasional, pers memiliki dua arti, pertama adalah usaha percetakan. Kedua berarti punya upaya penyampaian berita melalui media cetak atau elektronik.³ Kata pers seiring berjalannya waktu digunakan untuk menyebut dan menamai suatu usaha untuk bertukar pesan dan informasi bersama melalui surat kabar, majalah atau media massa lainnya. Pada umumnya, penyampaian informasi seperti ini disebut sebagai jurnalistik.⁴

Dari asal kata pers, dapat kita simpulkan bahwa pers merupakan sarana penyampaian berita-berita serta opini publik dengan menggunakan alat-alat yang menunjang untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan serta penyampaian berita baik secara cetak maupun elektronik.

Dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1966 tentang pers, pers didefinisikan sebagai “lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang memiliki karya sebagai alat komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil, atau alat-alat teknik lainnya.”⁵

²Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers...*, hlm. 6.

³ Akhmadi Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, (Semarang: Alprin, Edisi Digital 2019), hlm. 1.

⁴Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers...*, hlm. 3.

⁵ UU No. 2 Tahun 1996

Dari definisi ini dapat kita simpulkan pers mencakup lembaga masyarakat, alat komunikasi massa, dilengkapi dengan alat-alat lainnya. Definisi pada UU No. 2 tahun 1996 ini mencerminkan kondisi sosial pada tahun tersebut. Dibawah pimpinan Soekarno tahun tersebut sedang berada dalam kondisi revolusi.

Kemudian pada era reformasi dibentuk kembali Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers yang berisi tentang:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁶

Dibandingkan dengan definisi pers dalam UU No. 2 Tahun 1966, definisi pada UU No. 40 tahun 1999 lebih condong menerangkan fungsi dan teknis. Dapat dilihat dalam kalimat lembaga sosial dan wahana komunikasi dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Pers secara definisi dalam undang-undang dapat terus berubah-ubah, hal ini dipengaruhi oleh suasana zaman serta pemimpin kekuasaan. Dapat dilihat dari perubahan definisi pers dalam UU No. 2 Tahun 1966 sebagai alat reformasi yang digunakan sebagai alat komunikasi massa dan dari UU No. 40 Tahun 1999 sebagai lembaga yang menjadi wahana kegiatan jurnalistik. Dari kedua undang-undang tersebut kita dapat lihat perubahan definisi yang cukup fundamental.

⁶ UU No. 2 Tahun 1966.

Sedikitnya ada empat fungsi pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diantara keempat fungsi pers adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Informatif (*To-Inform*)

Fungsi pertama adalah fungsi informasi, yaitu memberikan informasi dan berita kepada masyarakat secara teratur. Pers menghimpun informasi dan berita yang layak dan berguna bagi masyarakat umum, kemudian menuliskannya dan menyebarkannya kepada publik.⁷ Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas, jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat dan etis.⁸

Fungsi informatif dalam pers sangat penting keberadaannya, karena pers merupakan media yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum sehingga akan sangat berguna bila pers diisi dengan hal-hal yang berbau informatif dan sangat akan mubazir bila hanya berisi hal yang kurang bermanfaat.

2. Fungsi Mendidik (*To-Educate*)

Lewat pemberitaannya, pers berusaha memberikan kepada pembacanya pencerahan, mencerdaskan dan meluaskan wawasan. Di dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik bagi pembacanya untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁹ Seperti ditegaskan oleh Wilbur Schramn dalam *men, mesages dan media* (1973), bagi masyarakat, pers adalah weatcher, teacher dan forum.¹⁰

⁷ Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik: Lierary Journalism* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 71.

⁸ Akhmadi Efendi, *Perkembangan Pers* , hlm. 5.

⁹Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers....*, hlm. 18.

¹⁰Akhmadi Efendi, *Perkembangan Pers* , hlm. 5-6.

Kemudian, dalam fungsi pendidikan ini pers diharapkan untuk menjadi media yang bisa memberikan informasi-informasi yang dapat mendidik pembacanya. Ketika pers digunakan sebagai media pendidikan, maka peningkatan kepekaan masyarakat terhadap hal-hal dalam masyarakat baik dalam bidang sosial, politik, budaya dan yang lainnya akan menjadi keunggulan bagi masyarakat.

3. Kontrol Sosial (*To-Influence*)

Pers menjadi alat untuk mengamalkan visinya, yaitu membenarkan yang benar dan meluruskan yang salah. Pers berfungsi sebagai kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers mendapat julukan sebagai *four estater*, pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹¹ Dalam hal ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi, atau mengontrol kekuatan legislatif, eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak korup dan absolut.¹²

4. Penghibur/Rekreasi (*To-Entertain*)

Pers dalam fungsinya sebagai hiburan harus mampu memainkan dirinya sebagai sarana rekreasi yang menyenangkan. Dalam media cetak, fungsi hiburan mampu direalisasikan dengan adanya teka-teki silang, cerpen ataupun anekdot yang tidak boleh bersifat negatif.¹³ Dalam media elektronik baik dalam radio dan televisi pers harus mampu menjadikannya sebagai wahana hiburan bagi publik. Bahkan sebelum adanya *news* di televisi dan radio hampir 80% acara yang ditayangkan adalah hiburan.

¹¹Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik: Lierary* , hlm. 73.

¹²Akhmadi Efendi, *Perkembangan Pers* , hlm. 6.

¹³Akhmadi Efendi, *Perkembangan Pers* , hlm. 6.

Pers dengan fungsinya sebagai media informasi memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan berita. Pemberitaan yang baik memiliki sistem verifikasi serta klarifikasi yang baik menurut etika jurnalistik. Dalam al-Quran verifikasi serta klarifikasi ketika menyikapi suatu berita yang datang disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدَمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Perkembangan pers di Indonesia menghadapi beberapa babak perjuangan yang dibedakan menurut jiwa zamannya. Sebelum masa kemerdekaan, pers dapat dibedakan menjadi tiga tahapan perkembangan, yaitu pers masa kolonial, pers Melayu Tionghoa dan pers nasional. Pers masa kolonial adalah pers yang digagas dan dijalankan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial atau penjajahan. Tahapan selanjutnya dalam perkembangan pers adalah pers Melayu Tionghoa. Pers Melayu Tionghoa adalah pers yang diterbitkan dan dikelola oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia.¹⁴

Selanjutnya adalah pers nasional, yaitu pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang pergerakan yang diperuntukan bagi orang-

¹⁴ Akhmadi Efendi, *Perkembangan Pers* , hlm. 9.

orang Indonesia. Pers ini digunakan sebagai media untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia di masa penjajahan.¹⁵

Perkembangan pers pada awalnya digunakan sebagai sarana pemberitaan dagangan oleh kolonial. Kemudian dari pers melayu tiongkok pers digunakan sebagai sarana pelestarian budaya tiongkok dan pers nasional digunakan sebagai sarana usaha kemerdekaan Indonesia. Perkembangan pers dari masa ke masa mempunyai tujuan dan peruntukan yang berbeda tergantung dengan kebutuhan serta kondisi sosial pada zaman tersebut.

Pada masa awal kemerdekaan, pers digunakan sebagai media serangan balik propaganda anti Belanda. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi revolusi, pers berubah ketika Indonesia telah diakui kemerdekaanya secara utuh. Jiwa revolusi didalam media massa mulai luntur dan digantikan menjadi media politik para penguasa.

Setelah jatuhnya Soekarno, maka dimulainya masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Di masa ini sistim politik yang dilakukan oleh rezim ini adalah sistim otoriter dan tidak demokratis. Kekuasaan eksekutif berada dibawah lembaga kepresidenan secara terpusat serta tertutup. Masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto berlangsung selama 32 tahun, masa ini kehidupan politik dinilai gagal karena sistim otoriter dan tidak demokratis tersebut. Lalu dalam segi pemerintahannya pula dinilai gagal sebab dalam masa ini tercipta pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik ini melakukan mekanisme hubunganantara pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan yang

¹⁵ Akhmadi Efendi, *Perkembangan Pers* , hlm. 9.

menyebabkan kesenjangan serta ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁶

Sistim politik yang dilaksanakan pada masa orba menurut beberapa pihak dinilai gagal karena telah mencoreng demokrasi di Indonesia. Sistim demokrasi di Indonesia pada masa ini digantikan dengan sistim sentralistik serta otoriter. Dengan sistim ini maka tumbuh suburlah KKN di Indonesia.

Lalu dalam politik partai-partai yang ada setelah pemilu 1971 dilakukan penyederhanaan jumlah partai. Penyederhanaan ini dilakukan dengan cara penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga dampak dari penggabungan partai ini adalah pelaksanaan kepartaian tidak lagi berdasarkan ideologi, melainkan atas persamaan program setiap partainya.¹⁷

Penggabungan ini menghasilkan tiga kekuatan partai politik. Yaitu; Pertama, Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Partai Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973. Partai ini yang kemudian disebut sebagai kelompok Islam. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo. Partai ini yang mewakili golongan yang bersifat Nasionalis. Dan Ketiga, adalah Partai Golongan Karya.¹⁸

Dengan penyederhanaan ini pula dapat kita lihat sebagai pembatasan hak demokrasi berpartai. Partai-partai Islam dengan beberapa corak perjuangannya

¹⁶ Hendra Permana, *Orde Baru* (Pontianak: Derwati Press, 2018), hlm. 12.

¹⁷ Hendra Permana, *Orde Baru ...* , hlm. 11.

¹⁸ Hendra Permana, *Orde Baru ...* , hlm. 11.

digabungkan dalam satu partai PPP. Sementara partai-partai yang berhaluan nasionalis digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia. Dan partai Golkar sebagai partai milik Pemerintah.

Pers disebut mahkota yang berkarat di masa orde baru, walaupun menteri penerangan, Let. Jen. Ali Murtopo, mengatakan “Kebebasan pers adalah mahkotanya orde baru”. Dalam perjalanan pers di Indonesia, tahun 1965 adalah masa paling buruk setelah Indonesia merdeka. Pada bulan Februari dan Maret ada 29 koran yang dilarang terbit. Dan ada 46 dari 163 surat kabar yang ditutup tanpa alasan yang jelas.¹⁹

Kebebasan pers pada masa Orde Baru selalu ditindas dengan aturan yang dilestarikan pada era Soeharto. Sejumlah media pers terus dibungkam pada masa ini.²⁰ Pembungkaman ini dilakukan dengan cara pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Pembredelan ini dikarenakan pemberitaannya tergolong sangat keras mengkritik pemerintahan.

Disisi lain, pada 6 maret 1971 terbit majalah yang berada di bawah PT. Grafiti Pers, yaitu majalah Tempo. Bertempat di Jl. Senen Raya 83 berisikan Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, bu Rasuanto dan Goenawan Muhammad sebagai Pemimpin redaksi.

Tempo Media Group dalam halaman <https://korporat.tempo.co/home/1> mengangkat visi: “Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik

¹⁹ Hendra Permana, *Orde Baru ...*, hlm. 11.

²⁰ Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers....*, hlm. 28-29.

untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.” Dan dengan mengangkat 6 misi sebagai berikut:

1. Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
2. Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.
3. Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.
4. Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
5. Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
6. Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.²¹

Majalah Tempo telah beberapa kali di beredel oleh pemerintah dari awal pendiriannya. Pada Januari 1974 karena pemberitaannya tentang peristiwa Malari terlalu kritis terhadap pemerintah. Pada 1982, Tempo kembali dilarang terbit sementara karena saat itu menuliskan peristiwa kerusuhan kampanye pemilu di lapangan banteng. Hingga pada akhirnya di tanggal 21 Juni 1994 Tempo dilarang terbit. Kemudian Tempo Kembali terbit pada oktober 1998 pada awal masa Reformasi.²²

²¹ <https://korporat.tempo.co/tentang/visi> diakses pada 04 Maret 2020 pukul 22.22 WIB.

²² Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers....*, hlm. 54-56.

Majalah tempo selalu menuliskan berita-berita yang unik dengan gaya penulisan berita menggunakan model cerita pendek. Gaya tulisan ini tidak membuat daya kritis Tempo menurun. Tempo selalu menggunakan cara kritik yang halus dan naratif.

Tempo merupakan media yang memberitakan tentang politik, hukum, dunia, sains, teknologi, olahraga, gaya hidup dan beberapa tema kajian lainnya. Tak tertinggal pula masalah-masalah keagamaan juga dibahas tempo sebagai bahan pemberitaan.

Pada masa pemimpin redaksi tempo dikepalai oleh Fikri Jufri, yang notabene mempunyai kedekatan dengan Benny Moerdani dan para teknokrat pendiri *Centre for Strategic International Studies (CSIS)*. Pada masa kepemimpinan Fikri Jufri, majalah tempo dianggap tidak netral. Dikarenakan pemberitaan Tempo lebih condong pada dukungan ke Benny Moerdani. Disini pihak yang diserang adalah kelompok Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI). Hingga ada sebutan perdikat "Majalah anti ICMI". Islam diserang dengan pemberitaan pembelian 39 kapal perang bekas Jerman. Sebenarnya kritik ini menjerus pada Menristek yang merupakan ketua ICMI pada masa itu adalah B.J. Habibie.

Dalam edisi-edisi sebelumnya, Islam juga kerap kali diberitakan di majalah Tempo. Bahkan isu-isu pemikiran Islam sempat menjadi headline di majalah tempo. Seperti pada edisi 03 April 1993, majalah tempo menjadikan Islam sebagai headlinenya dengan judul "Islam Menjawab Tantangan Zaman". Mundur ke tahun-tahun selanjutnya, Islam pula dijadikan headline pada edisi 14 Juni 1986 bertajuk

“Islam Setelah Asas Tunggal”. Selain itu, masih banyak berita-berita tentang Islam dalam majalah Tempo.

Disini dapat dilihat bahwa Islam pula menjadi sorotan majalah tempo dalam pemberitaan-pemberitaanya. Walaupun pada masa Orde Baru, kelompok Islam disimpan hanya menjadi kelompok minor yang bergerak di luar arena politik. Baru pada tahun 1985an Islam kembali muncul dengan membawa perubahan dengan sebutan “santrinisasi” atau “*ijo royo royo*.”²³

Dalam perkembangannya di era reformasi, Islam menjadi poros kebangkitan bangsa. Dengan beberapa cendikiawan Islam yang menjadi pemangku pemerintahan di Indonesia. Namun di sisi lain, ada pula di beberapa daerah pada zaman ini konflik antar agama. Di pihak lain, dengan jatuhnya rezim Orde Baru menjadi momentum terbitnya kembali majalah tempo tanpa harus mengurus surat-surat izin penerbitan serumit masa Orde Baru.

Majalah Tempo kembali terbit pada bulan Oktober 1998 setelah sebelumnya diberedel pada tahun 1994. Majalah Tempo pada akhir masa Orde Baru pernah dicap sebagai majalah anti ICMI yang merupakan organisasi para cendikiawan Islam. Kemudian setelah orde baru runtuh, apakah Majalah tempo masih saja menyerang umat Islam? Maka perlu diketahui apa yang menjadi kajian utama Majalah Tempo pada masa reformasi.

Untuk membatasi kajian ini, maka perlu pembatasan agar pembahasan tidak terlalu melebar. Ada dua batasan yang digunakan penulis, pertama adalah batasan

²³ Moeftich Hasbullah, *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara : Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*, (Depok: KENCANA, 2017), hlm. 194.

temporal atau batasan waktu dan yang kedua adalah batasan spasial atau ruang. Dalam batas temporal dipilih tahun 1998 dari awal terbit kembalinya majalah Tempo dan juga awal masa kepemimpinan B.J. Habibie sebagai wakil dari kalangan umat Islam hingga tahun 2004 ketika turunnya Presiden Megawati, di tahun ini pula dilaksanakan pemilihan umum serta menjadi pemilihan umum pertama rakyat langsung memilih presiden sebagai wakilnya. Sementara dalam hal batasan spasial penelitian ini pada majalah Tempo.

Berdasarkan uraian di atas tentang pers dan pemberitaannya pada Islam, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Pemberitaan Sosial Politik Islam Indonesia Dalam Majalah Tempo Tahun 1998-2004*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pemberitaan Islam dalam Majalah Tempo tahun 1998-2004. Permasalahan ini diuraikan dan dibatasi dalam dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kondisi sosial politik Islam Indonesia pada tahun 1998-2004?
2. Bagaimana pemberitaan sosial politik Islam Indonesia dalam majalah tempo tahun 1998-2004?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis rencanakan mengenai Islam dalam Pemberitaan Majalah Tempo Tahun 1998-2004 berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi sosial politik Islam Indonesia pada tahun 1998-2004.
2. Untuk mengetahui pemberitaan sosial politik Islam Indonesia dalam majalah tempo tahun 1998-2004.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah mencari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat membuat gambaran bagi penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Fadzillah tahun 2018 adalah mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitiannya *“Iklan Produk Islami dalam Media ; Studi Kasus dalam Majalah Sabili, Tempo dan Femina Tahun 2000-2005.”* Temuan dari penelitian ini adalah majalah dijadikan media iklan bagi produk-produk Islami. Dan dengan penggunaan media ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam strategi pemasaran.
2. Penelitian yang dilakukan Tannia Listia tahun 2015, adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul penelitian *“Perkembangan Sistem Politik Masa Reformasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Umum Orde Baru ke Reformasi Tahun 1997-2009).”* Hasil dari penelitian ini adalah selama masa reformasi sistem

politik pemilihan legislatif diikuti oleh peserta pemilu yang banyak dan dari berbagai latar belakang sehingga menunjukkan dinamika politik yang berkembang dari masa orde baru ke masa reformasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suriyanto tahun 2014, yang merupakan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian dengan judul "*Partai Politik Islam Di Indonesia Era Reformasi*" mengungkap tentang awalmulanya partai-partai Islam muncul dan berkembang setelah runtuhnya Orde Baru dan menjelang pemilu 1999, pola politik aliran dan masa depan partai Islam di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada gerak partai-partai Islam dalam memperoleh dukungan masa melalui politik aliran karenanya, penelitian ini masih kurang terlihat penilaiannya dari sudut pandang dari media masa. Beda penelitian oleh Suriyanto dengan penulis adalah tema kajian penulis lebih luas mencangkup masalah-masalah sosial politik menurut sudut pandang Majalah Tempo dan pembahasan Partai Islam Indonesia merupakan bagian dari pembahasan politik. Penelitian ini pula dapat menjadi referensi oleh penulis dalam mengulas perkembangan partai Islam.
4. Jurnal yang ditulis oleh Lili Romli dan dimuat dalam Jurnal Penelitian Politik Vol. I No. 1 tahun 2004. Jurnal yang mengungkap berdirinya kembali partai-partai Islam di Indonesia dan mengulas arah gerak partai. Disini ia membagi partai Islam dalam 3 tipe, yaitu partai tradisional, partai modern dan partai revivalis. Jurnal ini hanya membahas tentang partai Islam serta latar belakang partai tersebut, basis masa partai hanya sedikit dibahas serta kurang menyeluruh. Jurnal ini memiliki kesamaan kajian dalam sisi politik Islam dengan tumbuhnya partai-partai Islam di Indonesia. Namun, perbedaan dengan

penelitian penulis lebih luas kajian serta terfokus pada sudut pandang pemberitaan Majalah Tempo.

Maka dari beberapa penelitian yang relevan dengan judul, peneliti dapat membedakan kajian peneliti dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pemberitaan sosial-politik Islam di majalah tempo pada masa reformasi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian sejarah, metode yang dipakai adalah metode penelitian sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.²⁴

Untuk menghasilkan penelitian sejarah yang baik setidaknya diperlukan empat tahap, yaitu Heuristik atau pengumpulan data, Kritik, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan.²⁵

1. Heuristik

Heuristik adalah tahapan pertama dalam penelitian sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, *heuriskein* yang memiliki arti memperoleh. Dengan demikian, heuristik adalah tahap peneliti untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan berbagai sumber di berbagai tempat.²⁶

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44.

²⁵ Anton Dwi Laksono, *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian* (Pontianak: Derawati Press, 2018), hlm. 94.

²⁶ Anton Dwi Laksono, *Apa Itu Sejarah*, hlm. 94.

Pada tahapan ini, penulis melakukan pencarian yang mempunyai relevansi dengan tema yang diambil penulis, baik dalam bentuk buku, majalah dan artikel-artikel di internet. Dalam pencariannya, penulis pula mendatangi tempat-tempat yang berpotensi dapat ditemukan sumber tersebut. Tempat yang disambangi dalam pencarian ini seperti Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat dan beberapa tempat yang lainnya.

Dari hasil pencarian sumber tersebut, penulis menemukan beberapa sumber yang dapat membantu penelitian ini. Diantara sumber-sumber yang didapat penulis adalah sebagai berikut:

a). Sumber Primer

Karena kajian penelitian ini berfokus pada pemberitaan Majalah, maka sumber utama yang digunakan adalah Majalah Tempo. Adapun dalam tahapan heuristik ini penulis menemukan majalah Tempo dalam bentuk cetak diantaranya:

- 1) Tahun 1998
 - (a) Edisi 19 Oktober
- 2) Tahun 1999

Tabel 1
Daftar Majalah Tempo Tahun 1999

No.	Edisi	No.	Edisi
1.	1 Agustus	6.	5 September
2.	8 Agustus	7.	12 September
3.	15 Agustus	8.	19 September
4.	22 Agustus	9.	26 September
5.	29 Agustus	10.	3 Oktober

3) Tahun 2000

Tabel 2
Daftar Majalah Tempo Tahun 2000

No.	Edisi	No.	Edisi
1.	7 Mei	9.	9 Juli
2.	14 Mei	10.	16 Juli
3.	21 Mei	11.	25 Juni
4.	28 Mei	12.	10 September
5.	4 Juni	13.	24 September
6.	11 Juni	14.	08 Oktober
7.	18 Juni	15.	29 Juli
8.	2 Juli	16.	17 Desember

4) Tahun 2001

Tabel 3
Daftar Majalah Tempo Tahun 2001

No.	Edisi	No.	Edisi
1.	11 Februari	23.	12 Agustus
2.	18 Februari	24.	19 Agustus
3.	25 Februari	25.	26 Agustus
4.	11 Maret	26.	2 September
5.	18 Maret	27.	9 September
6.	25 Maret	28.	16 September
7.	08 April	29.	23 September
8.	22 April	30.	30 September
9.	29 April	31.	7 Oktober
10.	6 Mei	32.	14 Oktober
11.	13 Mei	33.	21 Oktober
12.	20 Mei	34.	28 Oktober
13.	27 Mei	35.	4 November
14.	10 Juni	36.	11 November
15.	17 Juni	37.	18 November
16.	24 Juni	38.	25 November
17.	1 Juli	39.	2 Desember
18.	8 Juli	40.	9 Desember
19.	15 Juli	41.	16 Desember

20.	22 Juli	42.	23 Desember
21.	29 Juli	43.	30 Desember
22.	5 Agustus	44.	

5) Tahun 2002

Tabel 4
Daftar Majalah Tempo Tahun 2002

No.	Edisi	No.	Edisi
1.	6 Januari	8.	25 Agustus
2.	13 Januari	9.	8 September
3.	10 Februari	10.	22 September
4.	17 Februari	11.	17 November
5.	24 Februari	12.	24 November
6.	10 Maret	13.	1 Desember
7.	18 Agustus	14.	22 Desember

6) Tahun 2003

Tabel 5
Daftar Majalah Tempo Tahun 2003

No.	Edisi	No.	Edisi
1.	2 Februari	13.	22 Juni
2.	9 Februari	14.	6 Juli
3.	16 Februari	15.	22 Juli
4.	23 Februari	16.	10 Agustus
5.	16 Maret	17.	21 September
6.	6 April	18.	5 Oktober
7.	27 April	19.	26 Oktober
8.	18 Mei	20.	23 November
9.	26 Mei	21.	14 Desember
10.	1 Juni	22.	21 Desember
11.	8 Juni	23.	28 Desember
12.	15 Juni		

7) Tahun 2004

Tabel 6
Daftar Majalah Tempo Tahun 2004

No.	Edisi	No.	Edisi
1.	18 Januari	6.	26 September
2.	25 Januari	7.	19 September
3.	22 Februari	8.	7 November
4.	28 Maret	9.	21 November
5.	18 Juli		

b). Sumber Sekunder

Untuk menambah gambaran terhadap penulisan mengenai tema kajian, maka diperlukan pula sumber-sumber pendukung berupa:

- 1) Bachtiar Efendy. 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam*
- 2) Azyumardi Azra. 1999. *Islam Reformis : Dinamika Intelektual dan Gerakan*
- 3) Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid*
- 4) Emha Ainun Najib. *Saat Terakhir Bersama Seharto*
- 5) Zuly Qodir. *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*

Selain itu, penulis pula menggunakan website <https://majalah.tempo.co/> sebagai pelengkap edisi-edisi yang tidak penulis temukan majalah bentuk cetaknya. Website ini merupakan website yang dikelola oleh majalah tempo sebagai media publikasi dalam bentuk online. Menyediakan majalah dalam bentuk online dari edisi pertama hingga edisi terbaru setiap bulannya.

2. Kritik

Tahap selanjutnya dari penelitian sejarah adalah kritik atau verifikasi untuk menguji keabsahan sumber. Tujuan dari tahap kritik ini adalah menguji otentisitas sumber sejarah.²⁷ Dalam tahapan ini, dilakukan penyeleksian terhadap sumber, baik dalam bentuk maupun isinya sehingga sumber yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Tahapan kritik dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern.

a). Kritik Eksternal

Kritik eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek fisik dari sumber. Atas dasar berbagai alasan atau syarat, setiap sumber harus dinyatakan dahulu autentik dan integralnya.²⁸ Kritik ekstern yaitu digunakan untuk meneliti otentisitas sumber secara bentuk dengan menguji material kertas atau bahan, tanggal, dan tanda yang terdapat di dalam teks.

Dalam tahapan kerja kritik ekstern perlu diajukan beberapa pertanyaan untuk menguji keotentikan sumber.

1) Apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki?

Pertanyaan ini menguji keotentikan sumber, dengan kata lain apakah sumber ini palsu atau tidak? Sumber yang penulis gunakan adalah sumber yang dikehendaki, arsip majalah yang penulis gunakan pula merupakan majalah yang diterbitkan oleh Tempo Media Group dengan kondisi jenis huruf, tanggal dan kertas yang masih baik.

²⁷ Sulasman, *Metodologi Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 101.

²⁸ Sjamsudin, Helius, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 83.

2) Apakah sumber itu asli atau turunan?

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan analisis sumber tentang bentuk fisik sumber apakah asli atau turunan. Proses sangat penting terutama bagi dokumen-dokumen yang diperoleh dapat diperbanyak dan disalin. Dalam proses penyalinan tersebut dapat ada kemungkinan perubahan dalam isi dokumen tersebut. Penulis dalam hal ini mendapatkan sumber arsip majalah asli dari penerbit Tempo Media Group, bukan fotokopi atau sumber turunan.

3) Apakah sumber itu utuh atau telah berubah-ubah?

Pertanyaan ini menguji tentang sumber yang digunakan merupakan sumber yang utuh atau sudah ada perubahan dari sumber asli. Ini dapat dijawab dengan melihat bentuk fisik sumber. Penulis mendapatkan sumber yang sebagian masih dalam bentuk utuh peredisi majalah. Namun ada beberapa edisi yang telah diubah dan disatukan menjadi bundelan beberapa edisi dalam setahun.

Setelah melakukan kritik ektern dan membuktikan bahwa sumber-sumber tersebut merupakan sumber yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dilanjutkan pada kritik internal.

b). Kritik Internal

Kritik internal menekankan kritik pada aspek isi dari sumber yang didapat. Setelah fakta kesaksian (fact of testimony) ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba gilirannya untuk mengadakan evaluasi terhadap

kesaksian itu, dan memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (reliable) atau tidak.²⁹

Dalam kritik intern ini dilakukan 3 hal. Pertama, mengadakan penilaian intrinsik, yang berkaitan dengan kompeten tidaknya suatu sumber, keahlian dan kedekatan dari sumber atau saksi. Penilaian intrinsik yang ini adalah penilaian terhadap pengarang sumber. Maka untuk menilainya, perlu menguji beberapa hal. *Pertama*, apakah pengarang sumber mampu memberikan kesaksian? Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber arsip majalah. Artikel-artikel berita yang dipublikasikan dalam berita merupakan hasil investigasi para jurnalis dari data-data yang mendukung tulisan tersebut serta telah diklarifikasi oleh pimpinan redaksi hingga dapat dimuat dan dipublikasikan dalam majalah. *Kedua*, apakah ia mampu menyampaikan kebenaran? Tulisan-tulisan jurnalis merupakan hasil analisis data dan informasi yang telah diklarifikasi. Majalah tempo merupakan majalah yang independen dan netral sehingga artikel-artikel berita yang dipublikasikannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, mengkomparasikan sumber atau membanding-bandingkan sumber. Majalah Tempo bila dibandingkan dengan majalah-majalah yang lainnya merupakan salah satu majalah yang paling berani dalam pemberitaan, terhitung sudah sekitar 2 kali pemberedelan Majalah Tempo pada masa Orde Baru. Hingga pada tahun 1994 Majalah Tempo dilarang terbit sampai diperbolehkan terbit kembali tahun 1998. Ini membuktikan

²⁹Sjamsudin, Helius, Metodologi, hlm. 91.

pula bahwa Majalah Tempo merupakan media massa yang dapat dipercaya kebenarannya.

Terakhir, korborasi yaitu pencarian sumber lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan sumber utama untuk mendukung kebenaran akan sumber utama. Namun apabila data atau sumber tidak bisa dilakukan korborasi, artinya sumber hanya berisi satu data saja, maka berlakulah prinsip argument ex silentio.³⁰

3. Intepretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering pula disebut dengan analisis sejarah. Interpretasi sering disebut biangnya subjektivitas karena dalam proses ini masuk pemikiran-pemikiran penulis atas suatu fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut kemudian dirangkai menjadi suatu rentetan tak terputus dari suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah subjektifitas itu diakui namun subjektifitas itu tetap harus dihindari.

Istilah sosial politik terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.³¹ Sedangkan politik menurut Deliar Noer merupakan ilmu yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan dalam kehidupan masyarakat.

³⁰ Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Depok: UI-Press, 2008), hlm. 130.

³¹ Susi Fitriana Dewi, *Sosiologi Politik* (Yogyakarta: GRE PUBLISING. 2017), hlm. 4.

Sosiologi politik atau disebut juga dengan sosial politik bila dilihat dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sosial politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia baik dalam bentuk individu maupun kelompok dalam memperhatikan kehidupan kekuasaan negara.

Dalam hal ini penulis membatasi kajian sosial politik ini dalam lingkup Islam. Kajian sosial politik Islam mencakup masalah-masalah sosial politik Islam baik dalam bentuk peristiwa, partai-partai islam, dan kajian-kajian lainnya yang masih tercakup dalam masalah sosial dan politik Islam.

Majalah Tempo dalam pemberitaannya pula memuat tentang isu-isu internasional. Tak jarang isu-isu sosial politik islam di luar Indonesia pula tak luput diberitakannya. Maka dari itu penulis pula membatasinya dengan kajian sosial politik Islam Indonesia. Agar pembahasan lebih terfokus pada pemberitaan sosial politik Islam di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Komunikasi yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendi. Ia menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauandan sebagainya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, niak langsung, secara tatap muka maupun tak langsung melalui media dengan tujuan mengubah sikap pandangan atau perilaku.³²

³²Onong Uchyana Effendy. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung : Rosda. 1993), hlm. 60.

4. Historiografi

Tahapan Historiografi merupakan tahapan berupa kegiatan penulisan hasil penafsiran atas fakta-fakta dan usaha merekonstruksi masa lampau untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan setelah sumber yang ditemukan pada tahapan heuristik, kemudian melewati tahap kritik dan interpretasi. Dengan demikian historiografi adalah tahapan lanjutan dari interpretasi yang kemudian hasilnya dituliskan menjadi kisah yang menarik. Pada tahapan historiografi ini, hasil penafsiran atas fakta-fakta itu kita tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Dengan demikian tahapan yang di atas telah disusun dengan sebaiknya. Dengan melihat tahapan-tahapan ini tidaklah mengherankan apabila dikatakan bahwa kerja seorang sejarawan untuk menghasilkan sebuah hasil karya ilmiah yang bernilai historis.

Pada tahapan ini, penulis mencoba untuk mengaitkan fakta, data dan hasil interpretasi yang akan penulis susun untuk menjadi tulisan. Adapun rencana sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari: A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penulisan, D. Kajian Pustaka, E. Langkah-langkah Penelitian.

BAB II: Merupakan penggambaran kondisi Sosial Politik Indonesia pada tahun 1998 – 2004. Dan juga mengulas tentang kondisi Umat Islam Indonesia pada tahun 1998 – 2004.

BAB III: Pemberitaan Islam pada Majalah Tempo tahun 1998-2004. Terdiri dari: A. Pemberitaan Sosial Politik Islam Indonesia Pada Oktober

1998 – Oktober 1999. B. Pemberitaan Sosial Politik Islam Indonesia Pada November 1999 – Juli 2001. C. Pemberitaan Sosial Politik Islam Indonesia Pada Juni 2001 – Desember 2004.

Bab IV: Merupakan bab penutup yang berisi A. Kesimpulan, B. Saran. Selanjutnya, dalam akhir penulisan dilengkapi dengan daftar isi serta lampiran-lampiran sumber.

